



FAKTOR YANG MEMENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ayu Pandansari¹⁾, Deva Fosterharoldas Swasto²⁾

Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

e-mail: ayupandansari@mail.ugm.ac.id

Article Info:

• Article submitted: 4 July 2025 • Article received: 18 February 2026 • Available online: 18 February 2026

ABSTRAK

Permukiman kumuh merupakan permasalahan krusial di Indonesia, di mana Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menjadi program strategis pemerintah berbasis masyarakat (*community-based development*) yang mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai komponen utama pelaksanaan program. Perbedaan karakteristik masyarakat perkotaan dan perdesaan (*urban and rural community*) dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi Program KOTAKU di Kabupaten Tulungagung dengan membandingkan wilayah kelurahan dan desa. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi di Kelurahan Terte dan Desa Serut. Tujuh variabel yang dianalisis meliputi pihak luar, kemauan, kemampuan, kesempatan, pemahaman masyarakat, iklim sosial masyarakat, serta pengetahuan tentang lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketujuh variabel tersebut merupakan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dan ditemukan di kedua lokasi, meskipun terdapat perbedaan dominasi faktor. Secara umum, terdapat variabel yang menjadi faktor pendukung dengan pengaruh kuat maupun lemah, sementara variabel lain cenderung menjadi faktor penghambat karena tingginya ketergantungan terhadap pihak luar. Studi ini merekomendasikan pemahaman mendalam tentang karakteristik masyarakat (*understanding community*) agar program sejenis di masa mendatang dapat lebih kontekstual.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Program KOTAKU, Permukiman Kumuh.*

ABSTRACT

Slum settlements remain a crucial issue in Indonesia, where the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program serves as a strategic community-based development initiative that emphasizes community participation as a key component of implementation. Differences in the characteristics of urban and rural communities may influence the level of community participation. This study aims to verify the factors affecting community participation in the implementation of the KOTAKU Program in Tulungagung Regency by comparing urban (kelurahan) and rural (desa) areas. This research employs a mixed-method approach combining quantitative and qualitative methods. Data were collected through questionnaires, interviews, and observations in Terte Urban Village and Serut Village. Seven variables were analyzed, including external parties, willingness, ability, opportunity, community understanding, social climate, and environmental knowledge. The results indicate that all seven variables influence community participation and are present in both locations, although the dominant factors differ. Some variables function as strong or weak supporting factors, while others tend to act as inhibiting factors due to high dependency on external parties. The study recommends a deeper understanding of community characteristics to ensure that similar programs in the future are implemented in a more contextual and adaptive manner.

Keywords: *Community Participation, KOTAKU Program, Slum Settlements.*



A. PENDAHULUAN

Permukiman merupakan sekelompok hunian yang mencakup bangunan rumah, jalan, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh manusia (Finch, 1957 dalam Ridwan & Giyarsih, 2012). Permukiman kumuh adalah area di mana kualitas lingkungan hunian telah menurun secara fisik, sosial, ekonomi, dan budaya karena kurangnya perhatian terhadap pembangunan. Kawasan ini pada umumnya dihuni oleh orang miskin, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai (Krisandriyana et al., 2019). Kondisi tersebut dipertegas oleh Avelar et al. (2009) yang menegaskan bahwa karakteristik utama permukiman kumuh meliputi kepadatan bangunan tinggi, struktur non-permanen, serta lokasi yang rawan banjir. Selain kepadatan yang tinggi, permukiman kumuh juga memiliki permasalahan sanitasi dan kebersihan. Setiap hunian pada permukiman kumuh tidak semuanya telah teraliri oleh air bersih dan terdapat pengolahan limbah dan sampah yang memadai (Oktarini et al., 2022). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang mendefinisikan permukiman kumuh sebagai area hunian yang tidak layak ditinggali, ditandai dengan tata bangunan yang tidak tertata, kepadatan bangunan yang ekstrem, serta kualitas bangunan dan fasilitas dasar yang buruk.

Kondisi tersebut pada dasarnya dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk beserta aktivitasnya yang mendorong bertambahnya kebutuhan ruang hunian dan ruang untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat (Sunarti, 2019 dalam Ekartaji et al., 2014). Fenomena ini seringkali tidak diikuti dengan distribusi pembangunan yang merata, sehingga terjadi ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan jalan, yang pada akhirnya memperburuk kualitas hidup penghuni, serta menghambat perkembangan sosial-ekonomi masyarakat (Firman, 2004). Akumulasi dari keterbatasan ruang dan tidak terpenuhinya infrastruktur tersebut memicu degradasi kawasan, yang ditandai dengan terbentuknya permukiman kumuh dengan kondisi fisik yang buruk dan akses infrastruktur dasar yang tidak memadai.

Sebagai bentuk komitmen nasional, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanganan permukiman kumuh sejak tahun 1969 melalui program



KIP (Kampung Improvement Program) hingga Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) (Huda et al., 2023). Diluncurkan pada tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Program KOTAKU menargetkan “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam platform kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai program nasional, KOTAKU telah diimplementasikan di 271 kabupaten/kota, salah satunya yaitu Kabupaten Tulungagung. Pelaksanaan program di Kabupaten Tulungagung merujuk pada Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/765/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Penanganan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar Penataan Permukiman Layak Huni di Kabupaten Tulungagung sebagai acuan dalam penanganan permukiman kumuh seluas 239,49 hektar yang tersebar di 18 desa dan 7 kelurahan.

Program KOTAKU menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*community-based development*), sehingga partisipasi aktif masyarakat menjadi komponen utama yang diwujudkan melalui konsep *participatory representation* yang merupakan hubungan langsung antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di lingkungannya secara kolaboratif (Guo & Musso, 2007 dalam Guan & Liu, 2021). Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh perbedaan tata kelola di lokasi pelaksanaan, yang secara regulasi membedakan antara kelurahan dan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, kelurahan berfungsi sebagai perangkat pelaksana di tingkat kecamatan dengan kewenangan otonom terbatas yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang diangkat oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan otonom yang lebih luas dan dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Ditinjau dari wilayah, kelurahan umumnya berada di wilayah perkotaan, sedangkan desa umumnya berada di wilayah perdesaan. Jika ditinjau dari konteks sosial, masyarakat di wilayah kelurahan tergolong dalam masyarakat perkotaan



(*urban community*) sedangkan masyarakat di wilayah desa tergolong dalam masyarakat perdesaan (*rural community*) (Smith, 1940). Masyarakat kelurahan umumnya bersifat lebih heterogen jika dibandingkan dengan masyarakat di wilayah desa yang cenderung homogen (Hasan, 2021). Masyarakat kelurahan yang cenderung heterogen pada umumnya memiliki karakteristik individualis dan terdapat jarak sosial sebagaimana diungkapkan oleh Yahya & Yahya, (2020) dengan integrasi sosial yang terbentuk melalui perbedaan peran individu (Durkheim, 1969 dalam Thijssen, 2012). Sementara masyarakat desa yang homogen cenderung memiliki keterikatan sosial yang kuat karena yang didukung oleh interaksi dan norma kolektif (Sampson et al., 2002 dalam Mancini et al., 2005). Perbedaan tata kelola pemerintahan, wilayah, serta karakteristik sosial tersebut diasumsikan mengakibatkan adanya variasi respons masyarakat yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi Program KOTAKU.

Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ditentukan oleh berbagai faktor yang berasal dari individu maupun pengaruh lingkungan sekitar. Menurut Nurbaiti & Bambang (2017), partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Keterlibatan dalam program atau kegiatan dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang, termasuk usia, jenis kelamin, status keluarga, tingkat pendidikan, latar belakang etnis dan agama, bahasa, pekerjaan, pendapatan, kedekatan lokasi tinggal dengan kegiatan, serta kepemilikan tanah (Cohen & Uphoff, 1977 dalam Nurbaiti & Bambang, 2017). Lebih lanjut, tingkat pendapatan dan lama tinggal atau kepemilikan lahan memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi aktif individu (Panudju, 1999 dalam Nurbaiti & Bambang, 2017). Kemauan dan kemampuan individu juga dapat mendorong sikap untuk berpartisipasi (Slamet, 2003 dalam Nurbaiti & Bambang, 2017). Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya keterlibatan pihak luar yang berkepentingan dan berpengaruh dalam implementasi program, antara lain pengurus desa, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, *Non-Government Organization* (NGO), dan pihak ketiga (yayasan sosial, Perguruan Tinggi) (Sunarti, 2003 dalam Nurbaiti & Bambang, 2017). Selain itu, kesempatan atau kondisi lingkungan di luar individu juga dapat memberikan peluang untuk berpartisipasi (Slamet, 2003 dalam Nurbaiti & Bambang, 2017). Menurut Arnstein (1969)



kesempatan ditentukan oleh pihak penyelenggara program melalui penyediaan ruang untuk berpartisipasi. Edwards et al. (2000) dalam Utami et al. (2019) mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat tentang program, iklim sosial masyarakat, serta pengetahuan tentang lingkungan dapat memengaruhi keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan yang telah dijabarkan mengenai latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan utamanya yaitu diindikasikan ada beragam faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, baik faktor internal maupun eksternal, yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi Program KOTAKU di Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya fenomena tersebut maka perlu dilakukan penelitian di dua lokasi yaitu pada tingkat kelurahan dan desa, untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait program pembangunan berbasis masyarakat dalam konteks wilayah yang berbeda. Pemahaman ini penting agar kebijakan atau strategi pelaksanaan program sejenis dapat lebih disesuaikan dengan konteks lokal.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang komprehensif, dengan menggabungkan metode kuantitatif kualitatif (*mixed method*). Data dikumpulkan menggunakan berbagai teknik, yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Metode kuantitatif dilakukan melalui pengumpulan data kuesioner, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis faktor untuk menentukan apakah suatu variabel menjadi penyebab korelasi antar variabel (Umar & Nisa, 2020). Kuesioner dibagikan kepada responden yang merupakan masyarakat yang tinggal dan bermukim di lokasi penelitian yang termasuk dalam delineasi kumuh. Metode kualitatif dilakukan melalui pengumpulan data wawancara dan observasi, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu permasalahan secara rinci dan mendalam melalui representasi yang akurat mengenai fenomena atau situasi yang



diteliti secara sistematis (Jonata, 2022). Sedangkan wawancara dilakukan kepada narasumber yang berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Koordinator Kota KOTAKU, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan masyarakat. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap fenomena yang tampak pada subjek penelitian melalui gestur, ekspresi, intonasi, dan pola bahasa yang digunakan oleh narasumber, serta mengamati objek penelitian yaitu lingkungan fisik, sarana dan prasarana, serta aktivitas masyarakat.

Penelitian dilakukan di kelurahan dan desa untuk dilakukan penyandingan hasil temuan di kedua lokasi tersebut. Pertimbangan pemilihan lokasi yaitu kelurahan dan desa yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Daerah yang mengatur tentang Penetapan Lokasi Penanganan Kawasan Prioritas Sektor Infrastruktur Dasar atau yang biasa disebut SK Kumuh. Selain itu, lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang telah dilakukan penanganan melalui Program KOTAKU dengan waktu yang tidak berjauhan. Pertimbangan berikutnya yaitu kedua lokasi memiliki skala kegiatan dan luas delineasi kumuh yang hampir sama. Lokasi terpilih yaitu Kelurahan Tertek dan Desa Serut karena telah memenuhi pertimbangan pemilihan lokasi.

Pada penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut: (1) penentuan faktor, (2) dominasi faktor, dan (3) pemahaman faktor. Penentuan faktor dilakukan untuk menentukan apakah variabel tersebut termasuk faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat atau tidak. Penentuan faktor ini berdasarkan mayoritas jawaban responden pada tiap variabel, dengan kriteria sebagaimana terlampir pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penentuan Faktor

Frekuensi Jawaban	Penentuan Faktor
$\geq 50\%$ responden menjawab SS dan S	Variabel merupakan faktor
$< 50\%$ responden menjawab SS dan S	Variabel bukan merupakan faktor

Selanjutnya dilakukan penentuan dominasi faktor untuk mengetahui faktor yang lebih dominan atau lemah dalam perspektif persepsi responden. Penentuan dominasi faktor ini dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari tiap indikator



pada tiap variabel faktor. Selanjutnya dilakukan perbandingan nilai rata-rata antar faktor, di mana faktor dengan nilai rata-rata tertinggi merupakan faktor yang paling dominan, sebaliknya faktor dengan nilai rata-rata terendah merupakan faktor yang paling lemah. Untuk menentukan nilai rata-rata pada tiap variabel adalah sebagai berikut.

$$Mean = \frac{(\sum SS \times 4) + (\sum S \times 3) + (\sum TS \times 2) + (\sum STS \times 1)}{N \times x_{max}} \times 100$$

Keterangan:

$\sum SS$ = jumlah jawaban SS

$\sum S$ = jumlah jawaban S

$\sum TS$ = jumlah jawaban TS

$\sum STS$ = jumlah jawaban STS

$x_{max} = 4$

Selanjutnya dilakukan penentuan klasifikasi untuk mengetahui faktor tersebut tergolong sebagai pendukung atau penghambat terbentuknya partisipasi masyarakat, yang dilakukan melalui analisis kualitatif deskriptif dengan mengidentifikasi pola dan hubungan antar konsepsi yang muncul dari informasi yang diberikan oleh narasumber, untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai keterkaitan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi Program KOTAKU menunjukkan kesamaan antara wilayah kelurahan dan desa, yang ditinjau dari hasil penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan terhadap 7 (tujuh) variabel yaitu pihak luar, kemauan, kemampuan, kesempatan, pemahaman masyarakat, iklim sosial masyarakat, dan pengetahuan tentang lingkungan merupakan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, baik di wilayah kelurahan maupun desa, sebagaimana terlampir pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Penentuan Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan dan Desa

No	Variabel/ Sub Variabel	Kelurahan		Desa	
		Hasil	Penilaian	Hasil	Penilaian
3.1	Pihak Luar	83,78%	Faktor	91,51%	Faktor
3.1.1	Keterlibatan pihak luar	81,08%	Faktor	94,34%	Faktor
3.1.2	Pengaruh pihak luar	86,49%	Faktor	88,68%	Faktor
3.2	Kemauan	97,30%	Faktor	92,45%	Faktor
3.2.1	Motivasi	94,59%	Faktor	84,91%	Faktor
3.2.2	Persepsi terhadap program	100%	Faktor	100%	Faktor
3.3	Kemampuan	93,24%	Faktor	95,28%	Faktor
3.3.1	Ketersediaan sumber daya	86,49%	Faktor	94,34%	Faktor
3.3.2	Kepuasan pemanfaatan sumber daya	100%	Faktor	96,23%	Faktor
3.4	Kesempatan	86,49%	Faktor	84,91%	Faktor
3.4.1	Ruang partisipasi	86,49%	Faktor	94,34%	Faktor
3.4.2	Kesetaraan akses partisipasi	86,49%	Faktor	75,47%	Faktor
3.5	Pemahaman Masyarakat	86,49%	Faktor	77,36%	Faktor
3.5.1	Pemahaman tentang program	100%	Faktor	94,34%	Faktor
3.5.2	Peningkatan pemahaman masyarakat	72,97%	Faktor	60,38%	Faktor
3.6	Iklim Sosial Masyarakat	93,24%	Faktor	92,45%	Faktor
3.6.1	Tingkat gotong royong	97,30%	Faktor	94,34%	Faktor
3.6.2	Kondisi sosial	89,19%	Faktor	90,57%	Faktor
3.7	Pengetahuan tentang Lingkungan	100%	Faktor	98,11%	Faktor
3.7.1	Kesadaran lingkungan	100%	Faktor	96,23%	Faktor
3.7.2	Kepedulian lingkungan	100%	Faktor	100%	Faktor

Selanjutnya dilakukan analisis dominasi faktor yang menunjukkan hasil bahwa faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat pada implementasi Program KOTAKU di wilayah kelurahan dan desa tergolong tinggi hingga sangat tinggi, sebagaimana terlampir pada Tabel 3. Dari ketujuh variabel, variabel pihak luar dan iklim sosial di wilayah desa menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pihak luar di wilayah desa lebih memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat, dan kondisi sosial masyarakat desa cenderung lebih kondusif dalam pelaksanaan Program KOTAKU.

Lain halnya dengan yang ditemukan di wilayah kelurahan, yang menunjukkan bahwa variabel kemauan, kemampuan, kesempatan, pemahaman masyarakat, serta pengetahuan tentang lingkungan menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Selain itu juga dapat dilihat adanya perbedaan dominasi faktor di kelurahan dan desa. Pada wilayah kelurahan, faktor yang memiliki dominasi dari yang paling tinggi hingga paling rendah yaitu: kemauan, pengetahuan tentang lingkungan, iklim sosial masyarakat, kemampuan, kesempatan, pemahaman masyarakat, dan pihak luar. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat di kelurahan adalah kemauan untuk terlibat, sedangkan keterlibatan pihak luar tidak terlalu berpengaruh pada partisipasi masyarakat. Lain halnya dengan di desa, di mana faktor yang memiliki dominasi dari yang paling tinggi hingga paling rendah yaitu: pengetahuan tentang lingkungan, iklim sosial masyarakat, kemauan, kemampuan, pihak luar, kesempatan, dan pemahaman masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat desa tentang lingkungan adalah faktor paling berpengaruh terhadap partisipasi mereka, diikuti oleh iklim sosial masyarakat setempat, karena masyarakat desa cenderung memiliki tingkat gotong royong yang tinggi.

Tabel 3. Hasil Analisis Dominasi Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan dan Desa

No	Variabel/ Sub Variabel	Kelurahan		Desa	
		Hasil	Penilaian	Hasil	Penilaian
3.1	Pihak Luar	73,65%	Tinggi	76,42%	Sangat Tinggi
3.1.1	Keterlibatan pihak luar	72,97%	Tinggi	76,89%	Sangat Tinggi
3.1.2	Pengaruh pihak luar	74,32%	Tinggi	75,94%	Sangat Tinggi
3.2	Kemauan	84,46%	Sangat Tinggi	79,25%	Sangat Tinggi
3.2.1	Motivasi	79,05%	Sangat Tinggi	72,64%	Tinggi
3.2.2	Persepsi terhadap program	89,86%	Sangat Tinggi	85,85%	Sangat Tinggi
3.3	Kemampuan	78,04	Sangat Tinggi	77,36%	Sangat Tinggi
3.3.1	Ketersediaan sumber daya	73,65%	Tinggi	77,36%	Sangat Tinggi
3.3.2	Kepuasan pemanfaatan sumber daya	82,43%	Sangat Tinggi	77,36%	Sangat Tinggi
3.4	Kesempatan	75,34%	Sangat Tinggi	73,35%	Tinggi
3.4.1	Ruang partisipasi	77,03%	Sangat Tinggi	76,42%	Sangat Tinggi



No	Variabel/ Sub Variabel	Kelurahan		Desa	
		Hasil	Penilaian	Hasil	Penilaian
3.4.2	Kesetaraan akses partisipasi	73,65%	Tinggi	70,28%	Tinggi
3.5	Pemahaman Masyarakat	73,99%	Tinggi	71,46%	Tinggi
3.5.1	Pemahaman tentang program	77,70%	Sangat Tinggi	77,36%	Sangat Tinggi
3.5.2	Peningkatan pemahaman masyarakat	70,27%	Tinggi	65,57%	Tinggi
3.6	Iklim Sosial Masyarakat	79,05%	Sangat Tinggi	80,19%	Sangat Tinggi
3.6.1	Tingkat gotong royong	81,76%	Sangat Tinggi	83,02%	Sangat Tinggi
3.6.2	Kondisi sosial	76,35%	Sangat Tinggi	77,36%	Sangat Tinggi
3.7	Pengetahuan tentang Lingkungan	83,45%	Sangat Tinggi	81,37%	Sangat Tinggi
3.7.1	Kesadaran lingkungan	83,11%	Sangat Tinggi	80,19%	Sangat Tinggi
3.7.2	Kepedulian lingkungan	83,78%	Sangat Tinggi	82,55%	Sangat Tinggi

Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan untuk memahami partisipasi masyarakat secara lebih mendalam. Proses ini melibatkan wawancara dengan narasumber yang berasal dari masyarakat di kedua lokasi penelitian. Hasil analisis kualitatif tentang faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4. Pada variabel pihak luar diketahui bahwa pihak luar yang terlibat dalam pelaksanaan program yaitu pemerintah kelurahan/desa. Hal yang membedakan yaitu pihak kelurahan terlibat aktif pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan pada tahap keberlanjutan tidak terlibat secara langsung, yang dikarenakan adanya perbedaan karakteristik pimpinan. Di sisi lain pihak desa terlibat secara langsung mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan. Jika ditinjau dari pengaruh yang diberikan, warga menilai bahwa pihak kelurahan tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program, karena keberadaan LKM yang terus berperan aktif. Lain halnya dengan yang terjadi di wilayah desa, di mana keterlibatan pemerintah desa dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Dengan adanya dorongan dari pimpinan di wilayah tersebut, masyarakat dapat lebih terdorong untuk ikut berpartisipasi.



Pada variabel kemauan, masyarakat kelurahan dan desa memiliki motivasi untuk berpartisipasi. Motivasi masyarakat kelurahan bersifat individual yang muncul atas dorongan pribadi, sedangkan motivasi masyarakat desa bersifat kolektif yang muncul atas dasar rasa memiliki (*sense of ownership*) untuk kepentingan bersama. Adanya dorongan motivasi tersebut membuat masyarakat di kedua lokasi tersebut memiliki kemauan untuk berpartisipasi secara aktif.

Ditemukan adanya perbedaan yang terlihat pada variabel iklim sosial masyarakat, sub variabel tingkat gotong royong. Tingkat gotong royong di wilayah desa lebih tinggi daripada kelurahan, hal ini mengindikasikan bahwa rasa kebersamaan adalah karakteristik kuat di kalangan masyarakat desa. Jika ditinjau dari hubungan antara BKM dengan pihak desa, hubungan yang terjadi lebih harmonis sehingga mewujudkan kolaborasi yang sinergis. Kondisi yang berbeda muncul pada wilayah kelurahan di mana terdapat dinamika sosial antara pihak kelurahan dengan LKM. Adanya dinamika sosial menyebabkan tidak adanya sinergi di antara keduanya.

Tabel 4. Hasil Analisis Kualitatif Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan dan Desa

No	Variabel/ Sub Variabel	Kelurahan	Desa
3.1	Pihak Luar		
3.1.1	Keterlibatan pihak luar	- Keterlibatan pihak luar paling banyak berasal dari pemerintah kelurahan, dengan keterlibatan secara tidak langsung. - Keterlibatan pemerintah daerah belum dirasakan.	- Keterlibatan pihak luar paling banyak berasal dari pemerintah desa melalui keterlibatan secara langsung. - Keterlibatan pemerintah daerah tidak terlalu dirasakan.
3.1.2	Pengaruh pihak luar	- Pihak luar dinilai tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan program. - Pemerintah kelurahan seharusnya dapat lebih berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat.	- Keterlibatan pemerintah desa dianggap memberikan pengaruh pada partisipasi masyarakat. - Pemerintah desa berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat.
3.2	Kemauan		
3.2.1	Motivasi	- Masyarakat memiliki motivasi pribadi untuk	Motivasi masyarakat bukan atas dorongan motivasi pribadi namun motivasi kolektif



No	Variabel/ Sub Variabel	Kelurahan	Desa
		berpartisipasi dalam Program KOTAKU. - Kesukarelaan masyarakat muncul akibat pembinaan yang dilakukan secara terus menerus.	berupa rasa memiliki (sense of ownership) dan kepentingan bersama.
3.2.2	Persepsi terhadap program	Persepsi masyarakat terhadap program bersifat positif dan mendorong partisipasi masyarakat.	Persepsi masyarakat terhadap program bersifat positif dan mendorong partisipasi masyarakat.
3.3	Kemampuan		
3.3.1	Ketersediaan sumber daya	- Ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yaitu waktu, pikiran, tenaga, materi/uang, fasilitas/tempat, dan lainnya. - Sumber daya terbanyak yaitu waktu dan tenaga.	- Ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat yaitu waktu, pikiran, tenaga, materi/uang, fasilitas/tempat, dan lainnya. - Sumber daya terbanyak yaitu tenaga dan waktu.
3.3.2	Kepuasan pemanfaatan sumber daya	Masyarakat merasa sumber daya yang telah diberikan dapat mendukung pelaksanaan Program KOTAKU hingga manfaat yang didapatkan melebihi ekspektasi masyarakat.	Masyarakat merasa sumber daya yang telah diberikan dapat memberikan manfaat yang didapatkan sehingga masyarakat cenderung berpartisipasi pada Program KOTAKU.
3.4	Kesempatan		
3.4.1	Ruang partisipasi	Terdapat ruang partisipasi berupa forum sosialisasi dan musyawarah atau pertemuan warga.	Terdapat ruang partisipasi berupa forum sosialisasi, musyawarah, dan pertemuan warga.
3.4.2	Kesetaraan akses partisipasi	Seluruh warga memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam implementasi program.	Seluruh warga memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam implementasi program.
3.5	Pemahaman Masyarakat		
3.5.1	Pemahaman tentang program	Masyarakat sudah memahami tentang Program KOTAKU karena sebelumnya sudah pernah dilaksanakan program sejenis.	Masyarakat sudah memahami tentang Program KOTAKU karena peran dari pihak pemerintah desa, pelaksana program, dan BKM.
3.5.2	Peningkatan pemahaman masyarakat	Masyarakat meningkatkan pemahaman melalui pendampingan dan sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana program.	- Masyarakat meningkatkan pemahaman melalui pendampingan dan sosialisasi oleh pelaksana program. - Anggota BKM sudah lebih memahami tentang Program KOTAKU.



No	Variabel/ Sub Variabel	Kelurahan	Desa
3.6	Iklm Sosial Masyarakat		
3.6.1	Tingkat gotong royong	Tingkat gotong royong tidak begitu tinggi, namun partisipasi tergolong tinggi dengan didorong sosialisasi secara terus menerus sehingga jiwa sosial semakin berkembang.	Tingkat gotong royong masyarakat tergolong tinggi termasuk dalam implementasi Program KOTAKU.
3.6.2	Kondisi sosial	- Kondisi sosial cenderung kondusif, selama pelaksanaan Program KOTAKU hanya ada konflik kecil. - Terdapat dinamika sosial antara pihak kelurahan dengan BKM/LKM.	- Kondisi sosial cenderung kondusif, selama pelaksanaan Program KOTAKU hanya ada konflik kecil. - Hubungan antara BKM dan pihak desa sinergis sehingga menciptakan kolaborasi yang baik.
3.7	Pengetahuan tentang Lingkungan		
3.7.1	Kesadaran lingkungan	Terdapat peningkatan kesadaran lingkungan pada masyarakat.	Masyarakat memiliki kesadaran lingkungan dari pengamatan sehari-hari secara langsung.
3.7.2	Kepedulian lingkungan	Kepedulian lingkungan pada masyarakat tergolong tinggi.	Kepedulian lingkungan pada masyarakat tergolong tinggi.

Dari ketujuh faktor tersebut, ditemukan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap partisipasi masyarakat. Hasil temuan kuantitatif yang didukung dengan temuan kualitatif menunjukkan bahwa terdapat faktor yang memberikan pengaruh kuat dan lemah. Kemauan menjadi faktor pendukung terhadap partisipasi masyarakat, yang ditandai dengan adanya motivasi pribadi maupun kolektif. Selain faktor tersebut, pengetahuan tentang lingkungan dan iklim sosial masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang bergantung pada kondisi sosial masyarakat. Kemampuan juga menjadi faktor pendukung partisipasi masyarakat, yang terlihat dari kesediaan masyarakat untuk memberikan sumber daya yang dimiliki secara sukarela. Keempat faktor tersebut menjadi faktor pendukung dengan pengaruh kuat. Sedangkan kesempatan dan pemahaman masyarakat menjadi faktor pendukung dengan pengaruh lemah. Sementara itu faktor pihak luar menunjukkan kondisi yang berbeda di kelurahan dan desa. Temuan di wilayah desa menunjukkan bahwa keterlibatan pihak luar memberikan pengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat, sedangkan di wilayah kelurahan



keterlibatan pihak luar dianggap tidak berpengaruh terhadap keterlibatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pihak luar dapat menjadi faktor penghambat karena sangat bergantung pada pihak luar, bukan muncul dari masyarakat sendiri.

Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal terdapat kesesuaian dengan teori yang diungkapkan oleh Slamet (2003) yaitu adanya kemauan untuk ikut berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan Program KOTAKU. Kemauan tersebut muncul dari adanya motivasi untuk terlibat dalam program, seperti yang dikemukakan oleh Lugiarti (2004). Selain aspek kemauan, aspek kemampuan juga menunjukkan adanya kesesuaian dengan yang diungkapkan oleh Slamet (2003), yaitu kemampuan yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam bentuk waktu, pikiran, tenaga, sarana, atau material. Hasil penelitian menunjukkan temuan lain yang berkaitan dengan teori yang diungkapkan oleh Cohen & Uphoff (1977), yaitu partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh aspek-aspek karakteristik individu, seperti kedekatan rumah dengan lokasi kegiatan dan status kepemilikan tanah. Mayoritas masyarakat di lokasi penelitian merupakan warga yang berasal dari lokasi itu sendiri dan tinggal di lokasi yang berdekatan dengan lokasi penanganan. Selanjutnya yang terjadi di wilayah desa, diketahui bahwa warga memberikan sebagian tanah pribadi untuk digunakan pembangunan infrastruktur, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan tanah dapat memberikan pengaruh pada partisipasi masyarakat, dalam hal kontribusi sumber daya. Hal ini juga didukung oleh Panudju (1999) yang mengemukakan bahwa status kepemilikan lahan atau hunian akan memengaruhi partisipasi dari individu. Hasil temuan juga menunjukkan adanya perbedaan iklim sosial masyarakat yang terlihat dari tingkat gotong royong masyarakat kelurahan yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kelurahan memiliki pola sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakat desa. Masyarakat kelurahan menunjukkan karakteristik yang selaras dengan masyarakat perkotaan (*urban community*), sedangkan karakteristik masyarakat desa sesuai dengan karakteristik masyarakat perdesaan (*rural community*) sebagaimana diungkapkan oleh Smith (1940).



Selanjutnya pada faktor eksternal diketahui bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh keterlibatan pihak luar (Sunarti, 2003). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pihak luar yang paling tinggi dirasakan keterlibatannya oleh masyarakat adalah pihak pemerintah kelurahan/desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pihak kelurahan tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat, sedangkan keterlibatan pihak desa dianggap berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Selanjutnya pada faktor eksternal juga dipengaruhi oleh aspek kesempatan, yaitu kondisi lingkungan yang memberikan peluang untuk berpartisipasi (Slamet, 2003). Pada pelaksanaannya, pelaksana Program KOTAKU menyediakan ruang partisipasi untuk masyarakat menyampaikan aspirasi melalui pelaksanaan forum musyawarah atau diskusi. Kondisi ini konsisten dengan pandangan Arnstein (1969) yang menyatakan bahwa kesempatan ditentukan oleh penyediaan ruang untuk berpartisipasi oleh pihak penyelenggara program.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pihak luar, kemauan, kemampuan, kesempatan, pemahaman masyarakat, iklim sosial masyarakat, dan pengetahuan tentang lingkungan merupakan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat pada implementasi Program KOTAKU. Hasil penelitian menunjukkan adanya sedikit perbedaan antara wilayah kelurahan dan desa. Jika ditinjau secara kualitatif, perbedaan terlihat pada variabel iklim sosial masyarakat, yaitu tingkat gotong royong masyarakat kelurahan tidak setinggi masyarakat desa, serta hubungan antara BKM dan pihak desa yang sinergis dibandingkan yang terjadi di kelurahan. Kondisi ini menunjukkan kesesuaian masyarakat kelurahan dengan karakteristik masyarakat perkotaan (*urban community*), sedangkan masyarakat desa sesuai dengan karakteristik masyarakat perdesaan (*rural community*). Perbedaan berikutnya terlihat pada pemerintah kelurahan yang tidak terlibat secara langsung khususnya pada tahap keberlanjutan, dibandingkan pemerintah desa yang terlibat secara langsung. Di antara ketujuh faktor tersebut, yang termasuk faktor pendukung dengan pengaruh kuat adalah: (1)



kemauan, (2) pengetahuan tentang lingkungan, (3) iklim sosial masyarakat, dan (4) kemampuan, sedangkan (1) kesempatan dan (2) pemahaman masyarakat termasuk sebagai faktor pendukung dengan pengaruh lemah. Sementara itu faktor yang menjadi penghambat adalah pihak luar.

Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program sejenis yaitu perlunya pemahaman yang lebih mendalam dari pemerintah daerah, pemerintah lokal, maupun fasilitator program terhadap karakteristik masyarakat di lokasi pelaksanaan program (*understanding community*) agar dampak program lebih kontekstual. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan eksplorasi yang lebih luas dengan melibatkan wilayah yang lebih beragam secara geografis maupun karakter sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Avelar, S., Zah, R., & Tavares-Corrêa, C. (2009). Linking Socioeconomic Classes and Land Cover Data in Lima, Peru: Assessment Through the Application of Remote Sensing and GIS. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 11(1), 27–37. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2008.05.001>
- Cohen, J., & Uphoff, N. (1977). Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation. *Cornel University, Ithaka*.
- Edwards, R. W., Jumper-Thurman, P., Plested, B. A., Oetting, E. R., & Swanson, L. (2000). The Community Readiness Model: Research to Practice. *Journal of Community Psychology*, 28(3), 291–307. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1520-6629\(200005\)28:3<291::AID-JCOP5>3.0.CO;2-9](https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6629(200005)28:3<291::AID-JCOP5>3.0.CO;2-9)
- Ekartaji, P., Yunus, H. S., & Rahardjo, N. (2014). Kajian Kualitas Lingkungan Permukiman di Daerah Pinggiran Kota Kasus di Desa Ngestiharjo, Yogyakarta. *Majalah Geografi Indonesia*, 28(1), 96–102.
- Firman, T. (2004). New Town Development in Jakarta Metropolitan Region: A Perspective of Spatial Segregation. *Habitat International*, 28(3), 349–368. [https://doi.org/10.1016/S0197-3975\(03\)00037-7](https://doi.org/10.1016/S0197-3975(03)00037-7)



- Guan, T., & Liu, T. (2021). Participatory Representation in a Non-Western Context: The Case of Homeowner Associations in Beijing. *Urban Affairs Review*, 57(4), 984–1014. <https://doi.org/10.1177/1078087420919504>
- Hasan, M. H. (2021). Pola dan Struktur Ruang Kelurahan Bulukunyi Sebagai Ibukota Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. *Geodusains: Jurnal Pendidikan Geografi*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.30872/geodusains.v2i1.536>
- Huda, A. S., Nuzullani, I., Maulidah, S. A., Kusuma, R. W., & Kurniawan, I. A. (2023). Kronologis Kebijakan Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Tahun 1969-2021. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 115–128.
- Jonata. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Pertama). Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta. *Desa-Kota Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 1(1), 24-33. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33>
- Mancini, J. A., Bowen, G. L., & Martin, J. A. (2005). Community Social Organization: A Conceptual Linchpin in Examining Families in the Context of Communities. *Family Relations*, 54(5), 570–582. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2005.00342.x>
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 224–228.
- Oktarini, M. F., Lussetyowati, T., & Primadella, P. (2022). Persepsi Pemukim terhadap Kualitas Lingkungan di Permukiman Kumuh Tepian Sungai Musi, Palembang. *Jurnal Permukiman*, 17(2), 85-92. <https://doi.org/10.31815/jp.2022.17.85-92>
- Panudju, B. (1999). *Pengadaan Perumahan Kota dengan Partisipasi Masyarakat Penghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



- Ridwan, U. H., & Giyarsih, S. R. (2012). Kualitas Lingkungan Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Daerah yang Berkarakter Pinggiran Kota dan Daerah Berkarakter Pedesaan di Kabupaten Muna. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(2), 118-125. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i2.11564>
- Slamet, M. (2003). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Smith, T. L. (1940). *The Sociology of Rural Life* (First Edition). New York: Harper & Brothers.
- Sunarti. (2003). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok. *Jurnal Tata Loka*, 5(1).
- Sunarti. (2019). *Buku Ajar Perumahan dan Permukiman*. Semarang: Undip Press.
- Thijssen, P. (2012). From Mechanical to Organic Solidarity, and Back: With Honneth beyond Durkheim. *European Journal of Social Theory*, 15(4). <https://doi.org/10.1177/1368431011423589>
- Umar, J., & Nisa, Y. F. (2020). Uji Validitas Konstruk dengan CFA dan Pelaporannya. *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*, 9(2), 1–11. <https://doi.org/10.15408/jp3i.v9i2.16964>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- Utami, F. R., Wijayanti, W. P., & Dinanti, D. (2019). Penilaian Stakeholder terhadap Kesiapan Masyarakat Desa Wisata Pujon Kidul. *Tata Kota dan Daerah*, 11(2), 61–70. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2019.011.02.2>
- Yahya, T., & Yahya, S. (2020). Social Characteristics and Differences of Urban and Rural Communities. *Journal La Sociale*, 1(5), 24–27. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v1i5.204>